

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Film feature “*Suara Tulus dari Malioboro*” menggambarkan realitas sosial penyandang disabilitas netra yang bekerja sebagai pengamen di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Melalui pendekatan observasional, film ini menghadirkan potret realitas kehidupan difabel di sektor kerja informal secara empatik dan realistis, seperti mengetahui motivasi, tantangan, serta pro dan kontra sosial yang mereka alami di ruang publik.

Karya ini memperlihatkan bahwa aktivitas mengamen bukan semata bentuk keterpaksaan ekonomi, tetapi juga wujud ekspresi diri, kemandirian, dan keberanian difabel untuk tetap bertahan di tengah keterbatasan tanpa harus dikasihani. Dalam konteks ini, “*Suara Tulus dari Malioboro*” menjadi representasi visual dari perjuangan kaum difabel untuk memperoleh pengakuan sosial dan hak atas pekerjaan yang setara.

Berdasarkan analisis proses produksi, film ini menunjukkan bahwa motivasi utama pengamen difabel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertahankan harga diri di tengah diskriminasi sosial dan terbatasnya lapangan kerja formal. Tantangan yang mereka hadapi meliputi stigma masyarakat, ketidakpastian ekonomi, serta minimnya akses terhadap pekerjaan inklusif. Namun, di sisi lain terdapat penerimaan, dukungan, dan solidaritas sosial yang menguatkan mereka untuk terus bertahan.

Pro dan kontra sosial yang diangkat dalam film ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah, perusahaan atau masyarakat dengan kelompok difabel dalam ruang publik. Beberapa pihak menunjukkan empati dan apresiasi terhadap kerja keras pengamen difabel, namun tidak sedikit pula yang masih menilai keberadaan mereka secara negatif. Melalui

visualisasi yang jujur dan narasi yang reflektif, film ini berupaya mengubah cara pandang mereka agar lebih inklusif, serta mengajak audiens untuk memahami bahwa difabel bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek aktif yang berdaya dan sama seperti manusia lainnya.

Dengan demikian, film “*Suara Tulus dari Malioboro*” tidak hanya menjadi karya film feature yang merekam fenomena sosial, tetapi juga media komunikasi yang menegaskan pentingnya inklusi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman manusia, khususnya di Indonesia. Film ini memperlihatkan bahwa ruang publik seperti Malioboro bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat perjuangan dan ekspresi sosial bagi mereka yang ingin diakui keberadaannya.

## **5.2 Saran**

### **1. Pengembangan Distribusi dan Edukasi Sosial**

Film “*Suara Tulus dari Malioboro*” memiliki potensi besar sebagai media edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas dan pekerjaan informal. Oleh karena itu film ini didistribusikan melalui platform digital seperti YouTube. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pesan dan membangun pemahaman publik tentang pentingnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

### **2. Peningkatan Dukungan Kebijakan dan Kolaborasi Sosial**

Pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas perlu memperkuat sinergi dalam menciptakan ruang kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Film ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pembuat kebijakan untuk meninjau kembali pelaksanaan regulasi seperti *Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012* tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, agar implementasinya lebih nyata di lapangan pekerjaan.

### **3. Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Media Kreatif**

Melalui film ini, terbukti bahwa media audio-visual memiliki kekuatan dalam menyuarakan realitas sosial difabel dan diharapkan adanya pelatihan dan pendampingan bagi komunitas difabel dalam bidang produksi media agar mereka dapat menceritakan kisahnya sendiri secara mandiri agar lebih luas.

### **4. Penelitian dan Pengembangan Karya Lanjutan**

Bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan kajian serupa, disarankan untuk melanjutkan penelitian mengenai representasi difabel dalam media dan ruang publik di daerah lain. Pendekatan komparatif, baik lintas wilayah maupun lintas sektor pekerjaan informal, dapat memperkaya wacana akademik tentang ketenagakerjaan inklusif dan komunikasi sosial difabel di Indonesia.

### **5. Perluasan Lapangan Kerja Inklusif bagi Difabel**

Pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi penyandang disabilitas, tidak hanya pada sektor formal, tetapi juga melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan di sektor informal. Perusahaan-perusahaan diimbau untuk menerapkan kebijakan rekrutmen yang ramah difabel, menyediakan fasilitas kerja yang lebih luas, serta memberikan kesempatan karier yang setara seperti manusia pada umumnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan komunitas difabel dan organisasi sosial untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung kemandirian ekonomi difabel, agar mereka tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada pekerjaan jalanan seperti mengamen.